



Masih Kaji Strategi Anggaran

■ Pembangunan Gedung Segoro Amarto

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana untuk membangun Menara Balai Kota di kompleks balai kota pada 2020. Tujuan didirikannya gedung bernama Segoro Amarto tersebut diklaim akan difungsikan sebagai sarana perkantoran bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih berkantor di luar kompleks balai kota. Sehingga dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana ini pun mendapat reaksi dari sejumlah anggota dewan. Bahkan pembahasannya dengan pihak legislatif sempat tertunda dua kali. Pertama, pembahasan soal itu dilakukan pada pekan lalu saat penetapan KUA PPAS

● ke halaman 15

Kalau untuk tahun 2020 sudah klir tidak ada masalah, tapi yang 2021 nya yang masih kita tinjau.

Danang Rudyatmoko
Ketua DPRD Kota Yogyakarta

● Pembangunan gedung tersebut rencananya akan dibayar lewat APBD dengan skema multiyear:

- Tahun 2020 sebesar Rp32.151.850 M
- Tahun 2021 Rp19.863.900 M

● Gedung ini difungsikan sebagai sarana perkantoran OPD yang belum berkantor di balai kota.

Membangun Gedung Baru

● Pemkot berencana membangun gedung bernama Segoro Amarto di kompleks balai kota pada tahun depan

Instansi	Nilai Berita
	<input type="checkbox"/> Negatif

anjut
nggapi
tahui

Masih Kaji Strategi Anggaran

• Sambungan Hal 9

APBD tahun 2020. Terbaru pada Selasa (22/10), lagi-lagi pembahasan kembali tertunda akibat persoalan anggaran.

Pembangunan gedung tersebut rencananya akan dibiayai lewat APBD dengan skema *multiyears* yakni tahun 2020 sebesar Rp32.151.850 miliar, kemudian tahun 2021 Rp79.985.900 miliar, dan total anggaran dari APBD tahun jamak Rp112.137.750 miliar.

Antonius Fokki Ardiyanto, anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dalam rilisnya yang diterima menolak rencana pembangunan itu. Menurutnya pembangunan tersebut belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Pasalnya, masih banyak agenda pembangunan lain yang dirasa lebih bermanfaat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiyatmo, menjelaskan, pihaknya masih akan mencermati sejumlah hal terkait rencana

pembangunan gedung tersebut. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang menjadi beban dan belum menjadi fokus perhatian oleh tim anggaran pada periode yang lalu maupun tim anggaran pemkot. "Intinya kami tidak akan membebani beban anggaran itu sepenuhnya kepada eksekutif. Karena jika terbebani juga nanti perwujudan pembangunan lima tahunnya pasti akan tersendat. Makanya kita *review* dulu," imbuhnya.

Danang menyebut, beban yang dikaji bukan hanya pada tahun 2020, melainkan juga pada tahun 2021. Sehingga program itu dapat terjaga secara bersamaan. Meskipun sudah direncanakan sejak lama, Danang menyatakan, tetap akan memperhatikan tingkat kematangan pembangunan. "Kalau untuk tahun 2020 sudah klir tidak ada masalah, tapi yang 2021 nya yang masih kita tinjau," urainya.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, pihaknya menyerahkan semua keputusan untuk dibahas pada level legislatif maupun eksekutif. Karena, kedua instansi itu punya tim anggaran masing-masing.

Haryadi mengklaim tetap

akan memprioritaskan apa yang menjadi fokus utama dalam anggaran APEN 2020, termasuk pembangunan gedung tersebut. Pembangunan gedung tersebut mesti dilihat dari kemanfaatannya, yakni memadukan pelayanan di balai kota. "Ya, mudah-mudahan tercapai kesepakatan yang baik guna kepentingan masyarakat," imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya menguraikan, pihaknya berharap keputusan yang dihasilkan bukan berorientasi pada penolakan atau tidak terkait pembangunan gedung tersebut. Namun, lebih kepada bagaimana strategi yang dilakukan terhadap kemampuan fiskal Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan anggaran.

"Kalau kita bicara proyek tahun jamak itu kan apa ada kemungkinan alternatif lain nantinya. Kalau mampu atau tidak, kemudian ditundur sampai kapan, nah lebih kepada itu," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya masih akan memprediksi kemampuan anggaran tahun 2020 dan 2021 mendatang. Sehingga perlu ada strategi yang tepat untuk mekanisme anggaran fiskal. (jst)

Konsep Green Building

KEPALA Bidang Bangunan Gedung DPUPKP Kota Yogyakarta, Joko Budi Prasetyo menjelaskan, saat ini rencana pembangunan gedung tersebut masih memasuki tahap *Detail Engineering Design (DED)* atau perencanaan gambar kerja dan persetujuan wali kota.

Nantinya gedung itu akan dibangun dengan delapan lantai dengan semi rubanah untuk kantin dan ruang genset. Lantai satu nantinya diperuntukkan bagi TPA, lantai dua untuk klinik pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau UPT.

Kemudian lantai 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk OPD, sementara lantai delapan untuk ruang rapat. "Kalau pendanaan kita estimasikan sekitar Rp110 miliar," jelasnya Senin (21/10).

● ke halaman 15

Konsep Green

● Sambungan Hal 9

Adapun luas bangunan yakni seluas 10 ribu meter per-

segi dengan tinggi hampir 48 meter yang akan dibangun di lokasi DPMPPA yang sekarang. Gedung akan berkonsep *green building* guna mengefisienkan energi dan lingkungan

dan juga diklaim akan ramah kepada difabel. "Sekarang kita tinggal menunggu persetujuan fasad. Mulai pembangunan mungkin bulan 7 tahun depan," katanya. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005